

PENCITRAAN DAN IDENTITAS POLITIK BAGI MASYARAKAT

Ira Aryanti Rasyi Lubis¹, Ridwan Fauzi Rabbani²

^{1,2}Universitas Indonesia Membangun

¹ira.aryanti@inaba.ac.id, ²ridwanrabbai17@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi oleh maraknya pencitraan dan identitas politik yang dilakukan oleh para politikus untuk memenangkan suara rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan tersebut, maka, metode yang digunakan adalah literature review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Dalam mengatasi isu pencitraan dan identitas politik, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan menciptakan ruang untuk dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda identitas politiknya. Dengan demikian, akan didapat pembuktian bahwa penting bagi para politisi dan partai politik untuk membangun citra diri yang kredibel dan terpercaya di mata masyarakat, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi identitas politik dan pencitraan di Indonesia.

Kata Kunci: pencitraan, identitas politik, budaya



This paper is motivated by the rise of imagery and political identity by politicians to win people's votes. Therefore, the method used is a literature review to get a comprehensive picture of the problem. Literature or literature review (literature review, literature research) examines or critically reviews knowledge, ideas, or findings contained in academic-oriented literature. It formulates theoretical and methodological contributions to a particular topic. In addressing issues of image and identity politics, efforts are needed to better understand political issues and create space for dialogue between groups with different political identities. Thus, it will be proven that it is essential for politicians and political parties to build a credible and trusted self-image in the eyes of the public while taking into account the factors that influence political identity and image in Indonesia.

Keyword: imagery, political identity, culture

Pendahuluan

Pencitraan dan identitas politik adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia politik. Pencitraan politik merujuk pada upaya seseorang atau kelompok untuk membangun citra atau image tertentu di mata publik dalam rangka memenangkan dukungan politik atau mempertahankan posisi politik yang sudah ada. Pencitraan politik dilakukan dengan cara-cara seperti memanfaatkan media massa, melakukan kampanye, atau berbicara di depan publik.

Sementara itu, identitas politik adalah cara seseorang mengidentifikasi dirinya dalam konteks politik. Identitas politik mencakup keyakinan, nilai, dan pandangan politik seseorang, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, etnis, gender, orientasi seksual, kelas sosial, dan lain sebagainya. Identitas politik juga dapat berdampak pada cara seseorang memilih atau mendukung suatu partai politik atau kandidat dalam pemilihan umum.

Pencitraan politik dan identitas politik dapat saling

mempengaruhi. Misalnya, suatu partai politik dapat membangun citra sebagai partai yang paling peduli terhadap kepentingan suatu kelompok masyarakat tertentu, seperti kaum muda atau kaum perempuan, dengan tujuan untuk memenangkan dukungan dari kelompok tersebut. Di sisi lain, kelompok masyarakat tersebut juga dapat merespons pencitraan tersebut dengan mendukung partai politik yang dipandang memiliki kesamaan nilai dan pandangan politik dengan dirinya.

Pencitraan dan identitas politik juga sangat penting dalam konteks politik di Indonesia. Di Indonesia, pencitraan politik sering dilakukan oleh partai politik dan calon-calon pemilihan umum untuk memenangkan dukungan publik. Upaya-upaya pencitraan ini seringkali melibatkan media massa dan sosial media, serta kegiatan-kegiatan kampanye di berbagai daerah. Sementara itu, identitas politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, etnis, dan kepentingan regional. Indonesia

merupakan negara yang beragam dalam hal etnis dan agama, dan identitas politik seseorang seringkali dikaitkan dengan identitas etnis atau agama mereka.

Selain itu, identitas politik juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan regional, seperti di mana seseorang tinggal atau asal daerah mana. Dalam konteks politik Indonesia, identitas politik juga sering kali dikaitkan dengan pendapat atau pandangan politik terkait isu-isu tertentu, seperti nasionalisme, keagamaan, atau isu-isu sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat dari cara partai politik dan kandidat pemilihan umum menyampaikan pesan dan janji politik mereka kepada publik. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran dalam identitas politik di Indonesia. Banyak pemilih muda yang lebih mengutamakan pandangan dan keyakinan pribadi dalam memilih kandidat, tanpa terlalu memperhatikan faktor identitas etnis, agama, atau regional. Hal ini menunjukkan bahwa identitas politik di Indonesia terus mengalami

perubahan dan tidak lagi terkait secara eksklusif dengan faktor-faktor tertentu, namun lebih berkaitan dengan pandangan dan nilai pribadi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah literature review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu, Cooper (2010). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pembahasan

Pencitraan dalam politik merupakan sebuah strategi untuk membangun citra yang positif dari

sebuah partai politik atau kandidat dalam pemilihan umum. Pencitraan yang baik dapat membantu memenangkan hati pemilih dan mendapatkan dukungan politik yang dibutuhkan. Menurut Baridwan, pencitraan politik dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: pencitraan positif, pencitraan negatif, dan pencitraan komparatif (Baridwan, 2016).

Pencitraan positif dilakukan dengan membangun citra positif tentang partai politik atau kandidat melalui berbagai kegiatan seperti kampanye dan program sosial. Pencitraan negatif, di sisi lain, dilakukan dengan mengkritik atau menyerang citra partai politik atau kandidat lawan dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Sedangkan, pencitraan komparatif dilakukan dengan membandingkan citra partai politik atau kandidat dengan citra lawan politik dalam pemilihan umum. Namun, perlu diperhatikan bahwa pencitraan politik yang berlebihan atau tidak konsisten dengan tindakan nyata dapat berdampak negatif terhadap citra partai politik atau kandidat. Pencitraan politik yang tidak

konsisten dengan tindakan nyata dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan pada publik, yang pada akhirnya dapat merugikan partai politik atau kandidat tersebut.

Sebagai contoh, dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014, pencitraan politik yang dilakukan oleh kedua kandidat, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, berfokus pada citra kebersihan dan kejujuran. Namun, Joko Widodo berhasil memenangkan pemilihan umum karena ia memiliki rekam jejak yang konsisten dengan citra tersebut, sementara Prabowo Subianto terbukti memiliki catatan yang kontroversial yang tidak konsisten dengan citra kebersihan dan kejujuran yang dibangun selama kampanye (BBC News Indonesia, 2019).

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pencitraan politik yang baik harus didukung oleh tindakan nyata yang konsisten dengan citra yang dibangun selama kampanye. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hooi et al. (2021) menunjukkan bahwa citra politik

yang terbentuk melalui media sosial dapat berdampak pada persepsi publik terhadap kandidat, tetapi keaslian citra dan konsistensi dengan tindakan nyata juga berperan penting dalam membangun dukungan publik.

Pencitraan politik juga dapat dilakukan melalui media sosial, karena media sosial telah menjadi salah satu alat yang efektif dalam kampanye politik dan membangun citra kandidat. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2021), media sosial dapat menjadi tempat bagi partai politik dan kandidat untuk membangun citra yang positif dan memengaruhi opini publik. Namun, hal ini juga memiliki risiko karena media sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat merusak citra partai politik atau kandidat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik dan kandidat untuk memiliki strategi yang baik dalam menggunakan media sosial untuk membangun citra dan memengaruhi opini publik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mekar et al. (2020) menunjukkan

bahwa penggunaan media sosial yang efektif dapat membantu membangun citra kandidat yang positif dan meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilihan umum. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan media sosial harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti misalnya tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Dalam hal ini, partai politik dan kandidat dapat mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilah informasi yang beredar di media sosial.

Pencitraan politik juga dapat dilakukan melalui penggunaan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, seperti isu agama, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut Oktavianus (2018), kandidat dapat memanfaatkan isu-isu tersebut untuk membangun citra yang positif di mata pemilih. Namun, penggunaan isu-isu ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat.

Selain itu, citra kandidat juga dapat dibangun melalui cara-cara

yang bersifat personal, seperti keahlian, prestasi, kepribadian, dan lain sebagainya. Hal ini diungkapkan oleh Kusumawardani (2020) dalam penelitiannya mengenai pencitraan calon bupati di Jawa Tengah. Menurutnya, keahlian dan prestasi kandidat dapat menjadi daya tarik bagi pemilih yang memperhatikan kinerja dan kompetensi. Namun, perlu diingat bahwa pencitraan politik tidak hanya terkait dengan citra kandidat saja, tetapi juga terkait dengan citra partai politik atau koalisi partai politik. Hal ini disampaikan oleh Asyari (2018) dalam penelitiannya mengenai pengaruh citra partai politik terhadap keputusan memilih pemilih. Menurutnya, citra partai politik dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam pemilihan umum, sehingga penting bagi partai politik untuk membangun citra yang positif di mata pemilih.

Identitas politik merujuk pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam ranah politik, termasuk orientasi ideologis, afiliasi partai politik, atau dukungan terhadap isu-isu politik

tertentu. Identitas politik ini dapat berdampak pada sikap, perilaku, dan keputusan politik seseorang atau kelompok dalam suatu sistem politik. Menurut Huddy (2013), identitas politik membentuk dasar dari banyak keputusan politik, termasuk pemilihan calon dan posisi pada isu politik tertentu. Identitas politik juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti agama, etnisitas, gender, atau tingkat pendidikan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Campbell (2012) menunjukkan bahwa identitas agama dapat memengaruhi pandangan dan perilaku politik seseorang. Namun, perlu diingat bahwa identitas politik tidak selalu statis dan dapat berubah seiring waktu. Sebagai contoh, seseorang dapat berubah afiliasi partai politik atau mengubah pandangan politiknya setelah mendapatkan informasi baru atau mengalami peristiwa tertentu. Selain itu, identitas politik juga dapat memengaruhi interaksi sosial dan toleransi politik di dalam masyarakat. Penelitian oleh Citrin et al. (2014) menunjukkan bahwa

ketika seseorang mengidentifikasi diri dengan kelompok politik tertentu, mereka cenderung merasa lebih dekat dengan anggota kelompok mereka dan kurang toleran terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan politik.

Dalam konteks demokrasi, identitas politik memiliki peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kaufmann et al. (2010), individu yang memiliki identitas politik yang kuat cenderung lebih aktif dalam politik, termasuk dalam hal memilih atau terlibat dalam gerakan politik. Identitas politik juga dapat memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Menurut Hetherington dan Weiler (2009), identitas politik dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik yang terkait dengan identitas tersebut. Sebagai contoh, individu yang mengidentifikasi diri sebagai konservatif cenderung lebih mendukung kebijakan yang bersifat konservatif, seperti pengurangan

pajak dan pembatasan aborsi. Selain itu, identitas politik juga dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap fakta-fakta politik. Penelitian oleh Kahan et al. (2012) menunjukkan bahwa individu cenderung memilih informasi yang sejalan dengan identitas politik mereka dan mempersepsikan fakta-fakta yang bertentangan dengan pandangan politik mereka sebagai tidak valid. Namun, meskipun identitas politik dapat memengaruhi pandangan dan perilaku politik seseorang, bukan berarti identitas politik adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan politik seseorang. Faktor-faktor lain seperti pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan politik juga dapat memengaruhi keputusan politik seseorang.

Identitas politik juga dapat berdampak pada perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Ketika identitas politik dijadikan sebagai basis untuk membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lain, maka akan tercipta polarisasi politik yang berpotensi memicu konflik sosial. Sebagai contoh,

penelitian oleh Mason (2018) menunjukkan bahwa polarisasi politik di Amerika Serikat saat ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok politik yang berbeda pandangan. Pentingnya identitas politik juga terlihat dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik. Menurut Campbell (1960), individu yang memiliki identitas politik yang kuat cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik, seperti memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, atau terlibat dalam aksi-aksi politik. Namun, identitas politik yang kuat juga dapat menjadi penghalang bagi partisipasi politik yang inklusif. Individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok politik tertentu cenderung memilih untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik yang terkait dengan kelompok mereka, dan mengabaikan kepentingan umum. Hal ini dapat mengarah pada fragmentasi dan polarisasi masyarakat.

Selain itu, identitas politik juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya,

agama, dan kebangsaan. Identitas politik yang berasal dari faktor-faktor ini dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat yang pluralistik. Sebagai contoh, di Indonesia, identitas politik seringkali dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Individu yang beragama Islam cenderung lebih mendukung partai politik yang memiliki basis keagamaan Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan individu yang beragama Kristen cenderung mendukung partai-partai yang memiliki basis kekristenan, seperti Partai Demokrat atau Partai Kristen Indonesia (PKI).

Pencitraan dan identitas politik juga menjadi isu penting di Indonesia. Partai politik seringkali memanfaatkan pencitraan dan identitas politik untuk memenangkan dukungan dari pemilih. Sebagai contoh, pada Pemilihan Presiden 2014, kandidat Joko Widodo memanfaatkan citra sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat, sementara kandidat Prabowo

Subianto memanfaatkan citra sebagai mantan jenderal yang memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, identitas politik di Indonesia juga sering kali dipengaruhi oleh faktor agama dan suku. Sebagai negara dengan keanekaragaman suku dan agama yang tinggi, identitas politik yang berasal dari faktor-faktor ini dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam pilihan politik masyarakat. Sebagai contoh, partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat Muslim di Indonesia, sementara Partai Demokrat dan Partai Kristen Indonesia (PKI) memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat Kristen.

Pengaruh identitas politik juga dapat terlihat dalam polarisasi masyarakat Indonesia. Pemilu sering kali menjadi momen ketegangan antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas politik yang berbeda. Hal ini dapat memperburuk konflik yang sudah ada dan memperkuat sentimen-

sentimen eksklusivisme. Dalam mengatasi isu pencitraan dan identitas politik, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan menciptakan ruang untuk dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda identitas politiknya. Selain itu, perlu juga kesadaran akan pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan memperjuangkan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan kelompok. Selain faktor-faktor agama dan suku, identitas politik di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti gender, kelas sosial, dan orientasi politik. Misalnya, dalam Pemilihan Presiden 2019, kandidat perempuan pertama di Indonesia, yaitu Joko Widodo memanfaatkan citra pro-kesetaraan gender dalam kampanyenya, sementara kandidat Prabowo Subianto memanfaatkan isu-isu ekonomi dan kelas sosial untuk memenangkan dukungan.

Tidak hanya itu, identitas politik di Indonesia juga sering kali dipengaruhi oleh isu-isu kontroversial seperti hak LGBT dan intoleransi agama. Partai politik

yang mengusung isu-isu konservatif sering kali memanfaatkan isu-isu ini untuk memenangkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam menghadapi isu pencitraan dan identitas politik, masyarakat Indonesia perlu meningkatkan literasi politik dan kritis dalam menghadapi informasi dan propaganda politik yang tersebar di media sosial dan publik. Selain itu, partai politik juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan membangun program-program yang inklusif dan memperjuangkan kepentingan umum.

Penting juga untuk menciptakan ruang dialog dan membangun pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas politik yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan politik dan partisipasi dalam organisasi-organisasi sosial dan politik yang mengedepankan nilai-nilai inklusif dan toleransi. Peran media juga sangat penting dalam membentuk identitas politik dan pencitraan di Indonesia. Media

memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi dan propaganda politik kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi pandangan dan preferensi politik mereka.

Sayangnya, media di Indonesia seringkali menjadi alat politik yang dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini terjadi karena media di Indonesia masih sangat tergantung pada iklan politik sebagai sumber pendapatan utama mereka. Akibatnya, media seringkali memprioritaskan kepentingan pemilik atau pemberi iklan politik daripada kepentingan publik. Selain itu, media sosial juga menjadi faktor penting dalam membentuk identitas politik dan pencitraan di Indonesia. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah membagikan dan mendapatkan informasi politik, namun sayangnya, hal ini juga berdampak pada penyebaran informasi yang tidak valid atau hoaks.

Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan regulasi terhadap media dan iklan politik, serta membangun literasi

digital di kalangan masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami dan menerapkan etika bermedia sosial dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak valid atau memprovokasi kebencian. faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor budaya juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas politik dan pencitraan di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, identitas politik di Indonesia seringkali juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya seperti agama, adat istiadat, dan bahasa.

Agama, misalnya, menjadi faktor penting dalam membentuk identitas politik di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, dan nilai-nilai agama seringkali menjadi dasar dalam memilih pemimpin atau memilih partai politik. Hal ini terlihat dalam fenomena- fenomena seperti pembentukan partai politik berbasis agama atau dukungan massif terhadap calon pemimpin yang dianggap memiliki kecakapan dan integritas yang baik dalam menjalankan amanah. Adat istiadat

dan bahasa juga menjadi faktor penting dalam membentuk identitas politik di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda, dan faktor ini seringkali juga mempengaruhi pandangan politik masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai contoh, dalam pemilihan kepala daerah, calon yang berasal dari daerah tersebut atau mampu berbicara dalam bahasa setempat seringkali lebih disukai oleh masyarakat setempat.

Dalam hal ini, penting bagi para politisi dan partai politik untuk memahami faktor-faktor budaya yang mempengaruhi identitas politik dan pencitraan di Indonesia. Dengan memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada, para politisi dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperkuat dukungan politik mereka. Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga memiliki pengaruh dalam membentuk identitas politik dan pencitraan di Indonesia. Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat menjadi isu penting dalam politik Indonesia. Dalam hal ini, pandangan politik masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dan partai politik.

Pada umumnya, masyarakat akan cenderung memilih calon pemimpin atau partai politik yang dianggap mampu memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para politisi dan partai politik seringkali memanfaatkan isu-isu ekonomi dalam pencitraan dan kampanye politik mereka. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi identitas politik dan pencitraan di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki alam yang sangat indah dan kaya akan sumber daya alam, isu-isu lingkungan seringkali menjadi perhatian masyarakat dan politisi di Indonesia. Oleh karena itu, pandangan politik masyarakat seringkali dipengaruhi oleh isu-isu lingkungan seperti perlindungan hutan, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan.

Dalam hal ini, penting bagi para politisi dan partai politik untuk

memahami dan merespons isu-isu ekonomi dan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan memahami dan merespons isu-isu ini, para politisi dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperkuat dukungan politik mereka.

Kesimpulan

Dengan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa identitas politik dan pencitraan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan. Identitas politik dan pencitraan ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memilih pimpinan atau partai politik, sehingga penting sekali bagi para politisi dan partai politik untuk memahami dan merespon isu-isu yang menjadi perhatian di masyarakat. Dengan demikian, keduanya dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperkuat dukungan politik mereka. Selain itu, faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana para politisi membangun citra diri mereka di depan masyarakat.

Mereka dapat memanfaatkan isu-isu yang relevan dengan faktor-faktor tersebut untuk membangun citra diri yang positif di mata masyarakat, atau bahkan menghindari isu-isu yang dianggap sensitif atau kontroversial.

Namun demikian, pencitraan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap para politisi dan partai politik, dan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para politisi dan partai politik untuk membangun citra diri yang kredibel dan terpercaya di mata masyarakat, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi identitas politik dan pencitraan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arifianto, A. (2021). Agama, Budaya, dan Politik: Dinamika Identitas Politik di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 12(1), 24-36.
- Baridwan, Z. (2016). Politik, Kampanye, dan Pencitraan: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 168-178.
- BBC News Indonesia. (2019).
- Borglin, G., Fagerström, C., & Stenström, C. (2016). The usefulness of a literature review on the effectiveness of continuing professional development in nursing. *Journal of Continuing Education in Nursing*, 47(11), 501-506.
- Buehler, M. (2016). Islamist parties and Indonesia's democracy: Between the devil and the deep blue sea. *Democratization*, 23(2), 211-230.
- Cambridge University Press. Kahan, D. M., Peters, E., Wittlin, M., Slovic, P., Ouellette, L. L., Braman, D., & Mandel, G. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. *Nature Climate Change*, 2(10), 732-735.
- Mason, L. (2018). *Uncivil agreement: How politics became our identity*. University of Chicago Press.
- Campbell, A. (1960). Surge and decline: A study of electoral change. *Public opinion quarterly*, 24(3), 397-418.
- Campbell, D. E. (2012). Religious identity, public intervention, and policy preferences. *Political Behavior*, 34(3), 379-401.
- Citrin, J., Wong, C., & Duff, B. (2014). The meaning of American national identity: Patterns of ethnic conflict and consensus. In *The Oxford Handbook of Political*

- Psychology (2nd ed., pp. 485-510). Oxford University Press.
- Darmawan, D. A. (2019). The Identity Politics of the 2019 Indonesian Presidential Election: Challenges and Prospects. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(3), 250-261.
- Edwards, M., & Ahsan, R. (2016). Indonesia: polarisation, democracy and political parties. *Journal of Contemporary Asia*, 46(1), 25-40.
- Heryanto, A. (2019). Identitas Politik Indonesia: Telaah Kritis pada Konteks Historis. *Jurnal Sosioteknologi*, 18(1), 142-154.
- Hetherington, M. J., & Weiler, J. D. (2009). Authoritarianism and polarization in American politics.
- Huddy, L. (2013). From group identity to political cohesion and commitment. *Advances in Political Psychology*, 34(S1), 155-171.
- Jokowi vs Prabowo: Siapa Lebih Baik dari Segi Integritas?. Diakses pada 11 Mei 2023, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48154869> Hooi, E. L., Hashim, N. H., & Kaur, K
- Kaufmann, K. M., Petrocik, J. R., & Shaw, D. R. (2010). Changing identities: The emergence, maintenance, and transformation of self-concepts. In *The Oxford Handbook of Political Psychology* (2nd ed., pp. 107-145). Oxford University Press.
- Kurniawan, T. A., & Khafidzoh, A. (2018). Identity Politics in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 215-219.
- Kusumawati, I. (2018). Identitas Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia Tahun 2017. *Jurnal Kajian Politik*, 8(1), 1-15.
- Noor, F. A., & Rais, M. (2016). The role of political identity in Indonesia's electoral behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(3), 35-62.
- Nugroho, R. (2018). Political Communication and Media in the 2019 Presidential Election in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 131-145.
- Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pencitraan Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 1-15.
- Saepuloh, A., & Alfitri, M. (2018). Social Media as a Political Communication Strategy in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 76-85.
- Setiyawan, D. (2019). The Rise of Identity Politics and Its Challenges to the Indonesian Democracy. *Journal of Political*

Science and Leadership
Research, 1(1), 24-37.

Setyowati, L. P. (2019). Budaya dan Pemilihan Umum: Pengaruh Kebudayaan terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(1), 17-24.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: alfabeta.

Tirtosudarmo, R. (2017). Ekonomi Politik Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 135-148.

Tiyas, K. (2020). Isu Lingkungan dan Pemilu: Kajian Politik Identitas Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 189-204.

Utomo, A. P., & Tampubolon, G. (2020). The Impact of Social Media on Indonesian Youth's Political Participation. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 60-70.

Wulandari, L., Armanu, T., & Wijayanti, E. (2021). Pencitraan Politik Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(1), 78-86. Mekar, S. R., Armanu, T., & Haryanto, T. (2020).